

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan sangatlah vital untuk seluruh masyarakat di sebuah negara. Pengembangan kesehatan ditujukan agar meraih tingkat kesehatan yang baik. Pada tingkat nasional, pembangunan kesehatan berguna dalam mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengaplikasikan pola hidup sehat. Usaha pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk terdiri dari program yang sudah ada, serta persetujuan Jaminan Kesehatan Nasional (Vivi Ridha Munawarah W. A., 2023)

WHO telah berkomitmen untuk mengembangkan suatu sistem yang di kenal Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan bahwa semua orang dapat menggunakan layanan kesehatan yang mereka butuhkan (Nur Mutmainna, 2021)

*World Health Organization* (WHO) mendefinisikan UHC sebagai sebuah mekanisme pembiayaan kesehatan yang memberikan jaminan bahwa seluruh orang mempunyai akses yang adil serta sama atas layanan kesehatan yang berkualitas, serta ekonomis secara finansial, entah untuk tujuan preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun promotif. Namun, UHC memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk cakupan, kualitas, dan sumber daya yang diberikan. Pemerintah berharap program ini akan mencakup

setidaknya 95% orang Indonesia pada awal 2019 (Ervi Ummi Nadhiroh, 2021)

Pada penerapannya, pemerintah menargetkan semua penduduk tercatat menjadi peserta JKN tanggal 1 Januari 2019 guna terwujudnya *Universal Health Coverage*. Akan tetapi hingga sekarang kenyataannya masih terdapat penduduk yang belum tercatat menjadi peserta JKN. Hal berikut mampu diketahui melalui data jumlah peserta BPJS Kesehatan, secara nasional total peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2016 ialah 171 juta jiwa ataupun 64%, tahun 2017 ialah 187 juta jiwa ataupun 72% kemudian tahun 2018 ialah 197 juta jiwa ataupun 80% total masyarakat Indonesia. Mengetahui data kepesertaan itu dari tahun 2016-2018 tentang total peserta BPJS kesehatan secara nasional menempuh pengembangan, tetapi program UHC yang ingin diperoleh di tahun 2019 awal dengan total peserta BPJS sejumlah 95% melalui jumlah masyarakat belum terlaksana (Nelisma, 2019)

Di Indonesia total masyarakat yang belum mengaplikasikan BPJS tercatat 68 juta serta mengaplikasikan hanya 81% sedangkan target awal 95% keikutsertaan daripada jumlah populasi yaitu 263 juta. Dari data DJSN mengatakan total masyarakat tanpa nomor NIK terdapat 14,8 juta orang segmen penerima bantuan iuran (PBI), 1,1 Juta individu pada segmen pekerja penerima Upah, serta 61,611 individu pada segmen pekerja bukan penerima upah.

Masyarakat yang mengaplikasikan BPJS sebanyak 215, 1 juta orang (Besse Wahyuni, 2022)

Data dari BPJS Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2019 ialah 8.411.467 jiwa melalui jumlah masyarakat 9.426.853 ataupun 89% melalui jumlah masyarakat Sulawesi Selatan, artinya hanya tersisa 1.015.389 juta masyarakat yang belum tercatat menjadi peserta program kesehatan pemerintah (Riqqah Tsamara, 2023)

Data dari BPJS Kesehatan Cabang Watampone Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo pada Bulan Januari 2023, Peserta PBI JK yaitu sebanyak 210.358 jiwa, PBPU dan BP Pemda sebanyak 112.195 jiwa, PPU BU sebanyak 15.226 jiwa, PPU PN sebanyak 27.253 jiwa, PBPU sebanyak 21.007 jiwa dan BP sebanyak 4.756 dengan total peserta keseluruhan 390.795 dan pada Bulan Desember 2023, Data Peserta PBI JK yaitu sebanyak 214.913 jiwa, PBPU dan BP Pemda sebanyak 120.552 jiwa, PPU BU sebanyak 16.797 jiwa, PPU PN sebanyak 25.301 jiwa, PBPU sebanyak 21.336 jiwa dan BP sebanyak 7.729 dengan total peserta keseluruhan 406.628 jiwa.

Berdasarkan data awal dari BPJS Kesehatan Cabang Watampone Bulan Januari 2023, Jumlah Penduduk Desa Paselloreng sebanyak 2.277 jiwa dengan total cakupan peserta JKN sebanyak 2.058 jiwa atau 90,38 % Cakupan Peserta UHC,

sedangkan pada bulan Desember 2023 jumlah penduduk Desa Paselloreng sebanyak 2.234 jiwa dengan total Cakupan Peserta JKN 2.203 jiwa atau 98,61% % Cakupan Peserta UHC .

Masalah yang membuat penelitian ini menjadi penting untuk diteliti adalah kesenjangan antara tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, dengan realitas yang dihadapi di lapangan, khususnya di UPT Bekkae Desa Paselloreng. Meskipun program ini telah diluncurkan beberapa tahun yang lalu, masih terdapat kendala dalam implementasinya di daerah-daerah terpencil seperti Paselloreng. Masalah aksesibilitas, kualitas layanan, dan pendidikan kesehatan masyarakat menjadi hal yang harus dipahami secara mendalam untuk memastikan program tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di UPT Bekkae Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, menjadi fokus penelitian yang penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terletak di daerah terpencil dan menjadi bagian dari daerah transmigrasi, UPT Bekkae Desa Paselloreng mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses

pelayanan kesehatan yang memadai. Kurangnya fasilitas puskesmas pembantu di wilayah tersebut. Disamping itu, minimnya informasi dan edukasi kesehatan untuk masyarakat desa juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.

Kurangnya sikap pro aktif mengenai kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk membantu sosialisasi kepesertaan Program JKN. Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya sebatas pada pemberian pelayanan kesehatan peserta JKN. Dalam hal ini Fasilitas Pelayanan Kesehatan kurang mempedulikan pemberian informasi yang lengkap. Seharusnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pemberi pelayanan pertama kepada masyarakat bertanggungjawab terhadap kondisi kesehatan masyarakatnya. Salah satunya dengan berperan aktif dalam mensosialisasikan kepesertaan Program JKN. Dan pada akhirnya mempermudah memperoleh manfaat pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Dalam mengatasi permasalahan ini, penggunaan kerangka teori yang diusulkan oleh Edward III pada tahun 1980 diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di UPT Bekkaee Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional?
2. Apakah ada pengaruh sumber daya terhadap Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional?
3. Apakah ada pengaruh Disposisi terhadap Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional?
4. Apakah ada pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional?

## **C. Tujuan penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di UPT Bekkae Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo

## 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di UPT Bekkae Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di UPT Bekkae Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Disposisi terhadap Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di UPT Bekkae Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo
- d. Untuk mengetahui Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di UPT Bekkae Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo

#### **D. Manfaat penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa diidentifikasi antara lain :

##### **1. Manfaat Bagi Peneliti**

- a. Memperdalam pemahaman terkait faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Mengasah keterampilan dan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan.

##### **2. Manfaat bagi Pemikiran Teoritis**

- a. Mendukung pengembangan teori – teori yang ada tentang faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Memungkinkan pengujian ulang teori – teori yang ada, dan mungkin menyebabkan revisi atau modifikasi teori berdasarkan temuan.

##### **3. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pembuat dalam merancang dan mengevaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Mengidentifikasi area – area yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam penyediaan layanan kesehatan nasional,

sehingga dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

- c. Memungkinkan peningkatan efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan memperhitungkan faktor kritis yang mempengaruhi Implementasinya.
- d. Berpotensi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memperbaiki program – program jaminan kesehatan nasional